

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Haula dan A. Candrawulan. *Yurisdiksi Badan Arbitrase ICSID dalam Varia Peradilan Nomor 54 Maret 1990* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 1990).
- Al-Mawardi. *Al Ahkam al Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al Fikr, 1960).
- Al-Munawar, Said Agil Husein. *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia* (Jakarta: BAMUI & BMI, 1994).
- Al-Munawwir, Ahmad Warsun. *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: Ponpes Krapyak, 1984).
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Arikunto, Sunarsimi. *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002).
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar El Fikr, 2005).
- Cahyadi, Thalys Noor. *Signifikansi Ombudsman dalam Menegakkan Bisnis Beretika dan Berkelanjutan dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010).
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Gardner, Bryan A.. *Black's Law Dictionary*, vol. VIII (St. Paul: West Publishing, 2004).
- Gifis, Steven H.. *Law Dictionary* (New York: Barron's Educational Series Inc, 1984).
- Goodpaster, Garry. *Panduan Negosiasi dan Mediasi, Seri Dasar Hukum Ekonomi 9* (Jakarta: ELIPS, 1999).
- Harahap, M. Yahya. *Arbitrase* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991).
- _____. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- _____. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).
- Lovenheim, Peter. *How to Mediate Your Dispute* (Berkeley: Nolo-Press, 1996).

- Ma'luf, Liwis. *Al Munjid al Lughoh wa al-A'lam* (Beirut: Daar al Masyriq, t.th.).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: MA, 2011.
- _____. *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: MA, 2013.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Depok: Kencana, 2017).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Nasution, Bahder Johar. *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).
- Suardi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Press, 2005).
- Sutiyoso, Bambang. *Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: Citra Media, 2006).
- _____. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2006).
- Texas Young Lawyers Association and The State Bar of Texas. *How to See in Small Claim Court*. Texas: TYLA & SBT, 2009.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

B. Jurnal dan Hasil Penelitian

- Ariani, Nevey Varida. "Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No. 3 (2018): h. 375-390.
- Bodiorga, Nikola. "Some Problems Concerning The Application Of Special Procedural Rules For Small Claims Litigations". *Zbornik Radova Pravnog Fakulteta Novi Sad* 49, no. 2 (2015): h. 649-661.

- Cahyadi, Thalish Noor. "BMT, Legalitas dan Pengawasannya". *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 2, No. 2 (2012): h. 167-186.
- _____. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Kritik atas *Contradictio in Terminis* Pasal 55 Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 1, No. 2 (2011): h. 15-29.
- Fu, Yulin. "Small Claim and Summary Procedure In China". *Brics Law Journal* 1, no. 1 (2014): h. 63-77.
- Hanifah, Ana Lathifatul. "Implementasi Gugatan Sederhana (*small claim court*) dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga". Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2018.
- Rajab, Taufik. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana Pada Pengadilan Negeri Mataram". *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram* (2018): h. 1-13.
- Riyanto, Benny dan Hapsari Tunjung Sekarti. "Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 48, No. 1 (2019): h. 97-114.
- Zuhriah, Erfaniah dan Miftahuddin Azmi, "Model *Small Claim Court* Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan *John Rawls*". *DeJure: Hurnal Hukum Islam dan Syari'ah* 11, No. 2, (2019): h. 128-141.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. "Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman", dalam *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157*. Jakarta: t.p., 2009.
- Republik Indonesia. "Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman", dalam *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8*. Jakarta: t.p., 2004.
- Republik Indonesia. "Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama", dalam *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22*. Jakarta: t.p., 2006.
- Republik Indonesia. "Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", dalam *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138*. Jakarta: t.p., 1999.
- Republik Indonesia. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", dalam *Staatsblad Nomor 23*. t.t.: t.pt., 1847.

- Republik Indonesia. “Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) S. 1927-227”. t.t.: t.pt., t.th..
- Republik Indonesia. “Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)”. t.t.: t.pt., t.th..
- Republik Indonesia. “Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*)”. t.t.: t.pt., t.th..
- Republik Indonesia. “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah”, dalam *Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2059*. Jakarta: t.pt., 2016.
- Republik Indonesia. “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”, dalam *Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1172*. Jakarta: t.pt., 2015.
- Republik Indonesia. “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah”, dalam *Berita Negara Republik Indonesia Nomor 597*. Jakarta: t.pt., 2016.
- Republik Indonesia. “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”, dalam *Berita Negara Republik Indonesia Nomor 175*. Jakarta: t.pt., 2016.
- Republik Indonesia. “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”, dalam *Berita Negara Republik Indonesia Nomor 942*. Jakarta: t.pt., 2019.
- Republik Indonesia. “Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan”. Jakarta: t.p., 2014.
- Republik Indonesia. “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan”. Jakarta: t.pt., 2014.
- Republik Indonesia. “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 perihal Putusan Verstek”. Jakarta: t.pt., 1964.
- Republik Indonesia. “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil”. Jakarta: t.pt., 2000.
- Republik Indonesia. “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat”. Jakarta: t.pt., 2001.
- Republik Indonesia. “Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn”, dalam *Salinan Putusan PA Sleman Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn*. Sleman: t.pt., 2019.

Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai Ta’widh Akibat Wanprestasi”. Jakarta: t.pt. 2019.

Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh)”. Jakarta: t.pt. 2004.

D. Internet

APSI. Anggap Perma Gugatan Sederhana Diskriminatif. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56c5bd4e14bad/apsi-anggap-perma-gugatan-sederhana-diskriminatif?page=1/.html> (1 November 2020).